



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

2019

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN SKPD TA. 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

BAB. II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Kebijakan Teknis

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB. III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB. IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1.1 Penjelasan pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.2 Penjelasan pos pos Laporan Operasional

4.1.3 Penjelasan pos pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.1.2 Penjelasan pos pos Neraca

4.2 Informasi Tambahan



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.2
- b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II (rinci)
- c. Daftar rincian Persediaan dan Berita Acara *Stock Opname* Persediaan Pakai Habis dan Barang Operasional Lainnya, (bibit, barang yang belum diserahkan kepada masyarakat, dan obat-obatan apabila ada) per 31 Desember 2019
- d. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah yang telah diterbitkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019
- e. Daftar/register terhadap blok karcis yang telah terobek dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019
- f. Daftar/register Kontrak Perjanjian dalam hal SKPD memungut pendapatan asli daerah tidak menggunakan SKPD/SKRD/Karcis dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019
- g. Daftar penyelesaian piutang dan bukti setornya
- h. Daftar umur piutang/aging schedule
- i. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku lebih dari satu periode akuntansi (1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019)
- j. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebelum tahun 2019 yang dibayar oleh Wajib Pajak/Retribusi tahun 2019 dan sebelumnya tidak tercatat pada Neraca akun Piutang
- k. Daftar/register setoran pendapatan tahun 2019 yang tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- l. Daftar pembayaran hutang belanja tahun 2018
- m. Daftar/bukti memorial atas tambahan hutang tahun 2019
- n. Daftar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)
- o. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atas hibah dari Pemerintah Pusat//Provinsi/Kabupaten lain/pihak ketiga
- p. Laporan dana yang dikelola oleh SKPD selain dana dari APBD
- q. Daftar Perolehan Aset Tetap Tahun 2019 yang berasal dari APBD
- r. Daftar aset tetap: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan aset lainnya (dari aplikasi SIMBADA)
- s. Kertas Kerja Penyusutan Aset Tetap
- t. Surat Keputusan Penghapusan Aset
- u. Kertas Kerja Amortisasi Aset Tak Berwujud
- v. Surat Keputusan Penilaian Aset



- w. Surat Keputusan Reklasifikasi Aset
- x. Surat keputusan perubahan/penetapan status pengguna barang
- y. Surat keputusan penghapusan barang operasional lainnya
- z. Berita Acara Pemusnahan Barang
- aa. Surat Keputusan Bupati (SK) tentang pemberian hibah kepada masyarakat dan berita acara serah terima barang (dalam APBD adalah belanja yang diserahkan kepada masyarakat)
- bb. Rincian Barang ke Neraca (dari aplikasi SIMBADA)
- cc. Daftar aset yang dipinjam/dipakai/digunakan oleh pihak ketiga dan dilengkapi dokumennya (jika ada)
- dd. KIB extracomptable yang berisikan :
 - Barang/aset yang harga perolehannya dibawah batas kapitalisasi (berlaku pengadaan mulai tahun 2010)
 - Barang/aset yang sudah dihapuskan akan tetapi belum dimusnahkan/dilelang
- ee. Berita Acara Lelang
- ff. Daftar UP/TUP dan daftar SP2D nihil
- gg. Bukti setor saldo UP/TUP dan bukti setor pengembalian belanja LS (*Contra Post*) tahun 2019
- hh. Copy Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2019
- ii. Daftar nama PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Bun,

Pengguna Anggaran

Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP

NIP. 19680609 199503 1 003



Halaman untuk Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
LAPORAN OPERASIONAL				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018				
(dalam Rupiah)				
Kode Akun	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan
	KEGIATAN OPERASIONAL			
8	PENDAPATAN-LO	13.015.492.835,00	7.906.177.729,24	5.109.315.105,76
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.958.779.350,00	1.725.354.729,24	233.424.620,76
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.956.441.350,00	1.724.829.000,00	231.612.350,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	2.338.000,00	525.729,24	1.812.270,76
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	11.056.713.485,00	6.180.823.000,00	4.875.890.485,00
8.3.1	Pendapatan Hibah	11.056.713.485,00	6.180.823.000,00	4.875.890.485,00
8.3.2	Pendapatan Darurat			
8.3.3	Pendapatan Lainnya			
9	BEBAN	242.371.050.865,33	287.934.419.939,83	(45.563.369.074,50)
9.1	BEBAN OPERASI	242.371.050.865,33	287.934.419.939,83	(45.563.369.074,50)
9.1.1	Beban Pegawai	8.214.787.047,00	7.956.895.067,00	257.891.980,00
9.1.2	Beban Persediaan	1.067.888.145,00	1.261.045.125,00	(193.156.980,00)
9.1.3	Beban Jasa	8.703.651.557,72	10.330.823.802,05	(1.627.172.244,33)
9.1.4	Beban Pemeliharaan	17.863.927.015,00	14.078.238.582,00	3.785.688.433,00
9.1.5	Beban Perjalanan Dinas	1.131.289.823,00	895.654.219,50	235.635.603,50
9.1.6	Beban Bunga			
9.1.7	Beban Subsidi			
9.1.8	Beban Hibah	6.284.897.280,32	19.171.829.000,00	(12.886.931.719,68)
9.1.9	Beban Bantuan Sosial			
9.1.10	Beban Penyusutan	196.431.480.197,29	231.551.706.404,28	(35.120.226.206,99)
9.1.11	Beban Amortisasi	2.673.129.800,00	2.688.227.740,00	(15.097.940,00)
9.1.12	Beban Penyisihan Piutang			
9.1.13	Beban Lain-lain			
	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI	(229.355.558.030,33)	(280.028.242.210,59)	50.672.684.180,26
9.3	KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	(493.472.748,50)	493.472.748,50
	SURPLUS NON OPERASIONAL			
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
	Jumlah Surplus Non Operasional	-	-	-

Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018			
		(dalam Rupiah)	
No	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	EKUITAS AWAL	189.332.592.074,73	505.431.266.742,42
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(229.355.558.030,33)	(280.521.714.959,09)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	4.045.672.887,61	(35.576.959.708,60)
1	Koreksi Saldo Aw al Kas dan Setara Kas		
2	Koreksi Saldo Aw al Kas di Bendahara Pengeluaran		
3	Koreksi Saldo Aw al Kas di Bendahara Penerimaan		
4	Koreksi Saldo Aw al Kas JKN		
5	Koreksi Saldo Aw al Kas BLUD		
6	Koreksi Saldo Aw al Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
7	Koreksi Saldo Aw al Piutang Pajak		
8	Koreksi Saldo Aw al Piutang Retribusi		
9	Koreksi Saldo Aw al Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
10	Koreksi Saldo Aw al Piutang Lainnya		
11	Koreksi Saldo Aw al Persediaan		
12	Koreksi Saldo Aw al Investasi Non Permanen		
13	Koreksi Saldo Aw al Investasi Permanen		
14	Koreksi Saldo Aw al Tanah	377.472.000,00	15.574.536.450,00
15	Koreksi Saldo Aw al Peralatan dan Mesin	-	(54.825,00)
16	Koreksi Saldo Aw al Gedung dan Bangunan		
17	Koreksi Saldo Aw al Jalan, Irigasi dan Jaringan	(178.481.752,42)	-
18	Koreksi Saldo Aw al Aset Tetap Lainnya		
19	Koreksi Saldo Aw al Konstruksi dalam Pengerjaan		
20	Koreksi Saldo Aw al Tagihan Lainnya		
21	Koreksi Saldo Aw al Aset Tak Berw ujud		
22	Koreksi Saldo Aw al Aset Lain-lain		
23	Koreksi Saldo Aw al Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
24	Koreksi Saldo Aw al Utang Jangka Pendek Lainnya		
25	Koreksi Nilai Piutang		
	Koreksi Penyisihan Piutang	3.340.000,00	1.925.225,00
26	Koreksi Nilai Persediaan	-	(8.369.000,00)
27	Koreksi Penyusutan Aset Tetap	3.843.342.640,03	(51.182.043.818,60)
28	Koreksi Amortisasi	-	37.046.260,00

	29	Koreksi Double Catat Aset Tetap		
	30	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
	31	Lain-Lain		
	EKUITAS AKHIR		(35.977.293.067,99)	189.332.592.074,73
			Pangkalan Bun,	2019
			Pengguna Anggaran,	
			Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP	
			NIP. 19680609 199503 1 003	



Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018			
			(dalam Rupiah)
NO	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas		
	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya		
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	-	
	Kas Di Bendahara Penerimaan		
	Kas JKN		
	Kas BLUD		
	Kas BOS		
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
	Investasi Jangka Pendek		
	Piutang Pajak		
	Piutang Retribusi	-	3.340.000,00
	Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi	-	(3.340.000,00)
	Beban Dibayar Di muka		
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
	Piutang Lainnya		
	Penyisihan Piutang Lainnya		
	Persediaan	9.978.604.910,00	9.987.690.905,32
	Jumlah Aset Lancar	9.978.604.910,00	9.987.690.905,32
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Non Permanen		
	Investasi Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
1.3	ASET TETAP		
	Tanah	271.077.076.240,00	270.699.604.240,00
	Peralatan dan Mesin	26.944.620.682,00	27.373.673.923,00
	Gedung dan Bangunan	70.975.605.785,65	53.465.399.725,65
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.568.065.453.630,96	2.397.301.766.243,95
	Aset Tetap Lainnya	1.266.392.700,00	1.266.392.700,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	35.812.197.082,00	29.187.989.482,00
	Akumulasi Penyusutan	(1.807.308.285.641,85)	(1.614.720.148.084,59)
	Jumlah Aset Tetap	1.166.833.060.478,76	1.164.574.678.230,01
1.4	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran		
	Tuntutan Ganti Rugi		
	Tagihan Lainnya	59.148.018,00	59.148.018,00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
	Aset Tak Berwujud	22.550.846.285,00	19.536.735.785,00
	Amortisasi	(15.203.975.585,00)	(12.530.845.785,00)
	Aset Lain-lain		
	Jumlah Aset Lainnya	7.406.018.718,00	7.065.038.018,00
	JUMLAH ASET	1.184.217.684.106,76	1.181.627.407.153,33

2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	Pendapatan Diterima Di Muka		
	Utang Belanja	254.171.626,00	249.064.507,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	254.171.626,00	249.064.507,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	254.171.626,00	249.064.507,00
3.	EKUITAS	1.183.963.512.480,76	1.181.378.342.646,33
3.1.1.01	EKUITAS	(35.977.293.067,99)	189.332.592.074,73
3.1.3.01	RK-PPKD	1.219.940.805.548,75	992.045.750.571,60
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.184.217.684.106,76	1.181.627.407.153,33
		Pangkalan Bun,	2019
		Pengguna Anggaran,	
		Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP	
		NIP. 19680609 199503 1 003	



PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan. Untuk melaksanakannya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentransir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.959.781.350 atau 97,98 persen dari yang ditetapkan dalam APBD



Perubahan TA 2019. Sementara itu, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 231.584.991.327,15 atau 99,34 persen dari yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA. 2019

2. Laporan Operasional memberikan informasi tentang Pendapatan LO dan Beban LO. Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Berdasarkan Laporan ini, total Pendapatan LO adalah sebesar Rp. 13.015.492.835,00 dan Beban LO adalah sebesar Rp. 242.371.050.865,33
3. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan saldo akhir ekuitas adalah sebesar (Rp. 35.977.293.067,99)
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 1.184.217.684.106,76 dan Kewajiban sebesar Rp. 254.171.626,00 sehingga Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.183.963.512.480,76
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahun 2019 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan



- Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019;



IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Kebijakan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Gerakan membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas.

b. Misi

Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dan arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup.

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pembinaan dan penyusunan program dan kegiatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD dapat terlihat pada ringkasan realisasi fisik dan keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Ringkasan Capaian Fisik dan Keuangan Tahun 2019		
Uraian	Realisasi 2019	
	Fisik	Keuangan
	%	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.788.176.909,06	95,41
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	203.355.163,00	87,69
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	87.526.150,00	94,05
Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.147.337.217,06	92,85
Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.786.440,00	100,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.030.000,00	76,35
Penyediaan alat tulis kantor	165.283.590,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.269.800,00	99,98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.612.000,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	359.926.549,00	98,96
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	682.050.000,00	100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	479.197.050,00	98,96
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30.000.000,00	100,00
Pengadaan Meubelair	35.075.000,00	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	58.793.050,00	95,98
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.440.000,00	90,98
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.000.000,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	349.889.000,00	99,40
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	187.143.884,00	98,49
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	187.143.884,00	98,49
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.500.000,00	79,82
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	100,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1.500.000,00	100,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	41.500.000,00	78,67



Program Pembinaan Konstruksi	820.492.288,00	91,81
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	141.576.800,00	95,54
Peningkatan Kapasitas Badan Usaha	58.304.000,00	94,80
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	377.520.839,00	86,77
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	243.090.649,00	97,65
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	7.299.105.866,02	99,64
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	6.703.676.366,02	99,61
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	595.429.500,00	100,00
Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	17.114.269.951,00	99,64
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	1.076.957.531,00	96,99
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman	3.029.987.500,00	99,92
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	13.007.324.920,00	99,80
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	119.417.719.221,79	99,93
Pembangunan Jalan	10.929.227.098,43	99,86
Pembangunan Jembatan	14.588.381.171,36	99,82
Peningkatan Jalan	93.900.110.952,00	99,96
Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	197.252.000,00	98,62
Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan	98.626.000,00	98,62
Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Jembatan	98.626.000,00	98,62
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	7.302.620.946,00	99,93
Pengembangan Distribusi Air Minum	2.263.947.000,00	99,94
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	5.038.673.946,00	99,92
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	5.449.977.300,30	99,80
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	5.449.977.300,30	99,80
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	34.130.419.800,00	99,82
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	1.219.297.500,00	100,00
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	32.907.872.300,00	99,84
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	3.250.000,00	28,88
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.148.773.144,98	97,41
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	291.491.714,55	97,16
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	857.281.430,43	99,77
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	0	0



Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	7.713.589.795,00	98,06
Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi	3.380.657.400,00	99,57
Pembangunan Jaringan Irigasi	1.605.939.390,00	99,55
Peningkatan Jaringan Irigasi	2.726.993.005,00	95,43
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	3.800.003.300,00	97,08
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3.800.003.300,00	97,08
Program Pengendalian Banjir	13.015.246.151,00	96,02
Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	4.675.921.500,00	97,76
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	3.238.434.848,00	88,78
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	5.100.889.803,00	99,55
Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	2.466.211.792,00	99,19
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kaw asan	1.012.143.660,00	98,91
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	143.645.182,00	97,35
Pengaw asan Pemanfaatan Ruang	1.310.422.950,00	99,62

2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

2.3.1 Hambatan dan KendalaPendapatan

Pada tahun 2019Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola 1 (satu) jenis Pendapatan yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan realisasi sebesar Rp.1.959.781.350,00 atau 97,98 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,00.

2.3.2 Hambatan dan Kendala Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 231.584.371.327,15 atau 99,34 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 233.177.233.000,00 secara keseluruhan realisasi belanja daerah tersebut 99,34 %, akan tetapi apabila dilihat lebih rinci maka terdapat belanja/program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target belanja (pencapaian kurang dari 95%) antara lain :

- a) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi sebesar Rp. 203.355.163,00 atau 87,69% dari target anggaran sebesar Rp. 231.900.000,00 karena merupakan belanja rutin dan besaran tagihan listrik, air, telpon serta internet adalah bersifat fluktuatif tidak memiliki angka tetap sesuai dengan pemakaian (sesuai tangihan rekening).
- b) Kegiatan penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional realisasi sebesar Rp. 87.526.150,00 atau 94,05% dari target anggaran sebesar Rp. 93.056.253,00 karena besar tagihan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bersifat fluktuatif sesuai dengan kebutuhan.



- c) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan realisasi sebesar Rp. 1.147.337.217,06 atau 92,85% dari target anggaran Rp. 1.235.616.200 karena ada tenaga honorer/tidak tetap yang mengambil izin melahirkan dan izin alasan penting.
- d) Kegiatan penyedia jasa perbaikan peralatan kerja realisasi sebesar Rp. 25.030.000,00 atau 76,35% dari target anggaran Rp. 32.780.000,00 karena perbaikan peralatan kerja dilakukan sesuai kebutuhan.
- e) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor realisasi sebesar Rp. 4.440.000,00 atau 90,98% dari target anggaran Rp. 4.880.000,00 karena pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan.
- f) Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun realisasi sebesar Rp. 41.500.000,00 atau 78,67% dari target anggaran Rp. 52.750.000,00 karena terdapat efisiensi pembayaran perjalanan dinas peserta konsinyering sesuai pembayaran at cost.
- g) Kegiatan peningkatan badan usaha realisasi sebesar Rp. 58.304.000,00 atau 94,80% dari target anggaran Rp. 61.500.000,00 karena terdapat efisiensi pembayaran perjalanan dinas narasumber sesuai pembayaran at cost.
- h) Kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi realisasi sebesar Rp. 377.520.839,00 atau 86,77% dari target anggaran Rp. 435.033.700,00 karena
- i) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi sebesar Rp. 3.250.000,00 atau 97,41% dari target anggaran Rp. 11.250.000,00 karena terdapat efisiensi di perjalanan dinas luar kota.
- j) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari target anggaran Rp. 20.000.000,00 karena tidak terselenggaranya kalibrasi pemeliharaan CBR Electrical Loading Machine oleh lembaga terakreditasi sehingga tidak bisa dibayarkan.
- k) Kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai realisasi sebesar Rp. 3.238.434.848,00 atau 88,78% dari target anggaran Rp. 3.647.671.000,00 karena terdapat efisiensi dari tender pemenang yang turun 25%.



KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman kepada: (1) kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat



Tahun Anggaran 2019, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk memenuhi kepentingan berikut:

- **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- **Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau



kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3. 2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu :

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada Laporan: Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan



nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.



e. Periodisitas (*periodicity*)

Laporan keuangan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK.

f. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 tidak ada perubahan metode akuntansi.

3.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari: PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat. PPKD menyusun LKPD berdasarkan konsolidasi laporan-laporan keuangan SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh: Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) yakni SKPKD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengguna anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d. 11.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 (yang dipergunakan sebagai data pembandingan atas realisasi per 31 Desember 2019) telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan opini “**Wajar Tanpa Pengecualian**”.



3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki hak atas pendapatan
- b. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.



- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dimana apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dimuka. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Belanja diakui pada saat :

- a. Pada saat diterbitkan SP2D LS;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran;
- c. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi asset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

3.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

3.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancarmeliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset non lancardiklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2. PD. Agrotama Mandiri
3. PD. Bank Pengkreditan Rakyat Marunting Sejahterah
4. PT. Bank Kalteng
5. PT. JAMKRIDA



Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klarifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah, yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai
- f. Kontruksi Dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Yang termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari



suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;

- c. Aset Tidak Berwujud, adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, hak merk, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
- d. Aset Lain-lain, yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

3.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*no-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.



Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.



Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK SKPD dan RK PPKD.

3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut:

1. *Pencatatan Persediaan*

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis retribusi, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

2. *Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

Penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:



a. Piutang Pajak

No	Kualitas Piutang Pajak	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (kurang dari 1 tahun)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 2 tahun)	10%
3.	Diragukan (2 s/d 3 tahun)	50%
4.	Macet (di atas 3 tahun)	100%

b. Piutang Retribusi

No	Kualitas Piutang Retribusi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 6 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (7 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 12 bulan setelah jatuh tempo)	100%

c. Piutang Tuntutan Ganti Rugi

No	Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (13 s/d 24 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 24 bulan setelah jatuh tempo)	100%



d. **Piutang Karena Perikatan Perjanjian**

No	Kualitas Piutang Karena Perikatan Perjanjian	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (satu bulan sejak tagihan pertama)	10%
3.	Diragukan (satu bulan sejak tagihan kedua)	50%
4.	Macet (satu bulan sejak tagihan ketiga)	100%

3. Pengakuan Belanja Modal

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan. Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran di DPA.

4. Pengakuan belanja pemeliharaan

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitaliasi sebagai asset tetap) jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap yang dipelihara :
Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau, bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
- b) Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap tersebut melebihi 1 tahun (jangka panjang)
Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan

Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara asset tetap meskipun jumlahnya material, tetapi digolongkan sebagai *revenue expenditure*. Sedangkan *revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*Current year*).



5. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan asset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

Batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap:

1. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin adalah pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan atau per unit peralatan dan mesinsama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00.
2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang nilainya pengeluaranya sama denganatau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian gedung dan bangunan seperti : teralis, sekat partisi, plafon, tambah daya listrik/instalasi listrik, keramik, pagar dll berapapun nilainya dikapitalisasi.
3. Nilai Satuan MinimumKapitalisasi untuk jalan/irigasi/jaringan yang nilainya pengeluaranya sama denganatau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian jalan/irigasi/jaringan seperti: trotoar, plangson dll.
4. Sedangkan untuk aset tetap renovasi yang nilai pengeluaranya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00

6. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Pengakuan Peyusutan untuk Perolehan aset tetap sebelum tahun 2019 atau sebelum diberlakukan akuntansi basis akrual proses penyusutan dimulai awal tahun berikutnya, untuk



perolehan aset tetap mulai tahun 2019 atau setelah diberlakukan basis akrual pengakuan penyusutan dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal BAST.

7. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Surplus Defisit atau Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi daerah, terdiri dari :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 1.962.119.350,00 atau 97,99 persen dari yang dianggarkan,

No.	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan (%)
		2019	2018	
1	Pendapatan Retribusi Daerah	1.959.781.350,00	1.763.859.229,24	11,11
2	Lain-lain PAD yang SAH	2.338.000,00	525.729,24	344,72

Berdasarkan tabel diatas, terdapat peningkatan realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Sedangkan untuk realisasi PAD yang sah meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Penyebab kenaikan realisasi pendapatan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan retribusi daerah tahun 2019 realisasinya **meningkat** dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan unit oleh pihak ke dua/penyewa yang menggunakan alat berat pada UPT Workshop dan peralatan konstruksi.
2. Meningkatnya peminjaman sewa alat berat oleh rekanan dari kabupaten lain.
3. Lain-lain PAD yang SAH tahun 2019 realisasinya **meningkat** dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, hal ini disebabkan oleh adanya pembayaran piutang dari sewa/uji laboratorium dari tunggakan tahun sebelumnya.

4.1.1.2 Belanja

No.	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan
		2019	2018	
1	Belanja Pegawai	8.209.671.928,00	7.707.838.560,00	6,51
2	Belanja Barang dan Jasa	35.042.575.825,72	38.574.730.583,87	(9,16)
3	Belanja Modal	188.332.743.573,43	196.996.966.804,25	(4,40)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :



4.1.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 sebesar Rp. 8.209.671.928,00 atau 97,49 persen dari yang dianggarkan. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk didalamnya pembayaran untuk beban tahun 2018 yang menjadi utang jangka pendek pada neraca tahun 2018 sebesar Rp. 249.064.507,00 yang dibayarkan melalui SP2D :

1. SP2D Nomor: 00260/BTL/SP2D-LS/2019, Tanggal 11 Maret 2019, untuk pembayaran gaji susulan stop gaji An. Hendry Purnama dan Alexandra Saritan
2. SP2D Nomor: 01971/BTL/SP2D-LS/2019, Tanggal 16 Desember 2019, untuk pembayaran kekurangan gaji sebanyak 5 (lima) orang PNS.
3. SP2D Nomor: 00094/BTL/SP2D-LS/2019, Tanggal 29 Januari 2019, untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai Ub. Desember 2018

4.1.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 sebesar Rp. 35.042.575.825,72 atau 97,40 persen dari yang dianggarkan. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut termasuk didalamnya pembayaran untuk beban tahun 2018 yang menjadi utang jangka pendek pada Neraca tahun 2018 sebesar Rp. 8.000,00 yang dibayarkan melalui SP2D Nomor 00547/BL/SP2D-LS/2019 Tanggal 12 Maret 2019 untuk pembayaran tagihan rekening air Ub. Desember 2018 dari PDAM Kab. Ktw. Barat.

4.1.1.2.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2019 sebesar Rp. 188.332.743.573,43 atau 99,62 persen dari yang dianggarkan. Dari jumlah realisasi Belanja Modal tersebut menambah nilai Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 188.332.743.573,43 dengan kata lain semua realisasi Belanja Modal menghasilkan Aset Tetap.

4.1.2 Penjelasan Pos pos Laporan Operasional

4.1.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.



Adapun penjelasan masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 1.962.119.350,00.

Selanjutnya PAD TA 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat tarifnya ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.962.119.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

4.1.2.2 Beban-LO

Beban LO merupakan beban/pengeluaran yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi dalam tahun 2019, sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 8.214.787.047,00.

b. Beban Persediaan

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo pemakaian atas barang-barang persediaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 1.067.888.145,00.

c. Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 8.703.651.557,72.

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 17.863.927.015,00.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 1.131.289.823,00.

f. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 6.284.897.280,32.



g. **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan merupakan saldo Beban Penyusutan yang berasal dari perhitungan penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 196.431.480.197,29

h. **Beban Amortisasi**

Beban Amortisasi per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 2.673.129.800,00.

4.1.2.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu surplus/defisit sebesar (Rp. 229.355.558.030,33).

4.1.3 Penjelasan Pos pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2019 sebesar Rp. 189.332.592.074,73 merupakan saldo awal 1 Januari 2019.
- b. Surplus/defisit-LO sebesar (Rp. 229.355.558.030,33) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2019.
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp. 4.045.672.887,61 disebabkan oleh:
 - Koreksi Saldo Awal Tanah sebesar Rp. 377.472.000,00 merupakan koreksi dan penilaian tanah.
 - Koreksi Saldo Awal Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar (Rp. 178.481.752,42) merupakan koreksi pengembalian hasil temuan pemeriksaan.
 - Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp. 3.340.000,00 merupakan koreksi penyisihan piutang yang sudah dilunasi.
 - Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp. 3.843.342.640,03 merupakan selisih akumulasi penyusutan 2018, antara lain
 - Mutasi barang ke Dinas Lingkungan Hidup
 - Adanya Atribusi
 - Reklas sesama aset tetap
- d. Sehingga saldo akhir ekuitas sebesar (Rp. 35.977.293.067,99).



4.1.4 **Penjelasan Pos pos Neraca**

4.1.4.1 **Aset Lancar**

4.1.4.1.2 **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 23.683.061,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah pada tanggal 27 Desember 2019.

4.1.4.1.14 **Persediaan**

Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 39.024.210,00 , dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2019
1.	Persediaan alat tulis kantor	31.242.360,00
2.	Persediaan alat listrik	1.999.000,00
3.	Persediaan benda Berharga	5.094.000,00
4.	Persediaan bahan pembersih	258.900,00
5.	Persediaan peralatan kebersihan	429.950,00
6	Persediaan Barang operasional	-
	Total	39.024.210,00

4.1.4.2 **Aset Tetap**

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 2.974.141.346.120,61**
Posisi Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	31 Desember 2019
1	Tanah	271.077.076.240,00
2	Peralatan dan Mesin	26.944.620.682,00
3	Gedung dan Bangunan	70.975.605.785,65
4	Jalan jaringan dan Irigasi	2.568.065.453.630,96
5	Aset Tetap Lainnya	1.266.392.700,00
6	KDP	35.812.197.082,00
	Jumlah	2.974.141.346.120,61



4.1.4.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 271.077.076.240,00**

Mutasi/perubahan Tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	270.699.604.240,00
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian	Rp	426.730.000,00
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	426.730.000,00
Pengurangan		
Mutasi/pindahan ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	49.258.000,00
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	49.258.000,00
Saldo Akhir	Rp	271.077.076.240,00

Penambahan Tanah tidak sama dengan Belanja Modal, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan yang tidak dipengaruhi oleh Belanja.

Penambahan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penilaian Tanah sebesar Rp. 426.730.000,- sesuai dengan SK Penilaian Nomor : 032/113/IV.I/BPKAD/2019, Tanggal 17 Desember 2019

Pengurangan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp. 49.258.000,- Konsultan Penilai Tanah (MAPPI)



4.1.4.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 26.944.620.682,00**

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Peralatan dan Mesin	Rp	27.373.673.923,00
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	474.191.749,00
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	824.572.010,00
Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah		
Jumlah	Rp	1.298.763.759,00
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	1.727.817.000,00
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	1.727.817.000,00
Saldo Akhir	Rp	26.944.620.682,00

• **PENAMBAHAN SAMA DENGAN BELANJA MODAL:**

Dengan demikian penambahan Peralatan dan Mesin sama persis dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan tidak terdapat transaksi yang tidak dipengaruhi oleh realisasi belanja.

• **PENAMBAHAN TIDAK SAMA DENGAN BELANJA MODAL:**

Penambahan Peralatan Dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya Reklas masuk sesama aset tetap dari belanja Gedung Dan Bangunan yang pengakuannya di akui sebagai Aset Peralatan Dan Mesin yaitu adanya Pembuatan Kapal Susur Sungai sebesar **Rp. 824.572.010,00**

Pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mutasi ke SKPD / Pengalihan Status ke Dinas Lingkungan Hidup berupa 1 (satu) unit excavator sebesar **Rp. 1.727.817.000,00** sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 600/1035/PUPR, tanggal 27 Desember 2019 dan Surat Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat Nomor : 032/2191.A/IV.II/BPKAD/2019 Tanggal 26 Desember 2019.



4.1.4.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 70.975.605.785,65**
Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Gedung dan Bangunan	Rp	53.465.399.725,65
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	31.843.240.200,00
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Mutasi/pindahan dari SKPD lain Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (Aset Rusak Berat)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	31.843.240.200,00
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	14.333.034.140,00
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	14.333.034.140,00
Saldo Akhir	Rp	70.975.605.785,65

• **PENAMBAHAN SAMA DENGAN BELANJA MODAL:**

Dengan demikian penambahan Gedung dan Bangunan sama persis dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan tidak terdapat transaksi yang tidak dipengaruhi oleh realisasi belanja.

Pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut: :

- Adanya Reklas keluar sesama aset tetap yaitu Pekerjaan perencanaan teknis yang diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar **Rp. 148.954.600,00**, dengan rincian :
 - Pekerjaan perencanaan teknis sedang/berat gedung Arsip dan Mushola sebesar Rp. 99.000.000,-
 - Pekerjaan perencanaan teknis IPAL Kec. Arut Selatan dan Kec. Arut Utara sebesar Rp. 98.032.000,-
- Adanya Reklas keluar sesama aset tetap yaitu Pekerjaan Water Font City yang diakui sebagai Jalan, Irigasi Dan Jaringan (JIJ) sebesar **Rp. 7. 922.709.540,00**
- Adanya Reklas keluar sesama aset tetap yaitu Pekerjaan Water Front City Tahun Anggaran 2018 yang diakui sebagai Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan (JIJ) sebesar **Rp. 6.261.730.000,00**



4.1.4.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 2.568.065.453.630,96**

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Jalan, jembatan, irigasi dan jaringan	Rp	2.397.301.766.243,95
Penambahan :	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	153.001.201.124,43
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	13.525.737.977,58
Reklas dari aset lainnya (Aset rusak berat)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	11.056.713.485,00
Jumlah	Rp	177.583.652.587,01
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	6.819.965.200,00
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	6.819.965.200,00
Saldo Akhir	Rp	2.568.065.453.630,96

• **PENAMBAHAN TIDAK SAMA DENGAN BELANJA MODAL:**

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak sama dengan Belanja Modal, hal ini disebabkan oleh penambahan dan pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh Belanja.

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Adanya reklas masuk sesama aset tetap sebesar **Rp. 13.525.738.277,58**, yang terdiri dari :
 - Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang diakui sebagai aset Jalan sebesar **Rp. 344.352.500,00**, dengan rincian :
 - Pekerjaan perencanaan teknis tahun 2017, sebesar Rp. 43.307.500,00.
 - Pekerjaan perencanaan teknis tahun 2018, sebesar Rp. 98.030.000,00.
 - Pekerjaan perencanaan teknis tahun 2018, sebesar Rp. 98.780.000,00.
 - Pekerjaan perencanaan teknis tahun 2018, sebesar Rp. 98.235.000,00.
 - Dari Gedung Dan Bangunan, Pekerjaan Water Front City yang pengakuan asetnya diakui sebagai aset Jembatan sebesar **Rp. 7.098.137.530,00**
 - Dari Gedung Dan Bangunan, Pekerjaan Water Front City Tahun 2018, yang pengakuan asetnya diakui sebagai aset Jembatan sebesar **Rp. 6.261.730.000,00**, dan dikurangi setoran pengembalian sebesar **Rp. 178.481.752,42**, Jadi total reklas masuk Dari Gedung Dan Bangunan Tahun 2018 sebesar **Rp. 6.083.248.247,58**.



- 2 Adanya hibah dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah berupa Jalan lingkungan sebesar **Rp. 11.056.713.485,00**, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 629 / 023 / PERKIMTAN-ASET / XII / 2019, Tanggal 17 Desember 2019.

Sedangkan pengurangan yang dipengaruhi oleh Belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Adanya reklas keluar sesama aset tetap berupa pekerjaan yang masih belum selesai pengerjaannya sehingga diakui sebagai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan nilai total sebesar **Rp. 6.819.965.200,00**, dengan rincian :
 - a. Pekerjaan Fisik senilai **Rp. 6.325.480.000,00**, terdiri dari :
 - Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 1 sebesar Rp. 3.278.135.000,00.
 - Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5 sebesar Rp. 3.047.345.000,00.
 - b. Pekerjaan Perencanaan Teknis senilai **Rp. 494.485.200,00**, terdiri dari :
 - Pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan sebesar Rp. 99.528.000,00.
 - Pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan sebesar Rp. 98.947.200,00
 - Pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan sebesar Rp. 98.956.000,00
 - Pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan sebesar Rp. 99.022.000,00
 - Pekerjaan perencanaan teknis IPAL Kec. Arut Selatan dan Kec. Arut Utara sebesar Rp. 98.032.000,00



4.1.4.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 1.266.392.700,00**
Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	Rp	1.266.392.700,00
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (Aset rusak berat)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	1.266.392.700,00

4.1.4.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 35.812.197.082,00**

Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	29.187.989.482,00
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	6.968.559.800,00
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	6.968.559.800,00
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	344.352.200,00
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	344.352.200,00
Saldo Akhir	Rp	35.812.197.082,00



Penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja yaitu sebesar **Rp. 6.968.559.800,00** bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp. 148.594.600,00** dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp. 6.819.956.200,00** yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Perencanaan Teknis Gedung Dan Bangunan sebesar **Rp. 148.594.600,00**, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan perencanaan teknis sedang/berat Gedung Arsip dan Musholla, sebesar Rp. 99.000.000,-
 - b. Pekerjaan perencanaan teknis Bundaran Misbar Kec. Arut Selatan sebesar Rp. 49.594.600,-
2. Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp. 494.485.200,00**, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jalan sebesar Rp. 99.528.000,-
 - b. Pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jalan sebesar Rp. 98.947.200,-
 - c. Pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jalan sebesar Rp. 98.956.000,-
 - d. Pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jalan sebesar Rp. 99.022.000,-
 - e. Pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jalan sebesar Rp. 98.032.000,-
3. Pekerjaan Fisik Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar **Rp. 6.325.480.000,00**, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 1 sebesar Rp. 3.278.135.000,-
 - b. Pekerjaan jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5 sebesar Rp. 3.047.345.000,-

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi keluar (sesama Aset Tetap) ke klasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan karena pekerjaannya telah selesai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 dengan total senilai **Rp. 344.352.200,00**, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan perencanaan teknis peningkatan struktur jalan Pasir Panjang – Kumpai Batu Atas – Kumpai Batu Bawah (Arut Selatan) Tahun 2017, **senilai Rp. 49.307.200,-**
 - b. Pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jalan Bandara Iskandar + Jalan Iskandar + Jalan Diponegoro + Jalan Pakunegara + Jalan A. Yani + Jalan Maliho + Jalan Pasanah + Jalan Natai Arahan + Jalan HM. Rafi'i (Arut Selatan) Tahun 2018, **senilai Rp. 98.030.000,-**
 - c. Pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jalan Pangkut/Bagimang Panji – Aspec Paper + Jalan Sp. Aspec Paper – Nanga Mua (Arut Utara) Tahun 2018, **senilai Rp. 98.780.000,-**
 - d. Pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jalan Simpang Dinamika – Pangkalan Banteng Tahun 2018, **senilai Rp. 98.235.000,-**



4.1.4.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan hasil koreksi penyusutan pada aset tetap Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dari tahun ketahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 adalah **(Rp. 1.807.308.285.641,85)**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Akumlasi Penyusutan
1.	Peralatan dan Mesin	(23.414.786.775,42)
2.	Gedung dan Bangunan	(11.631.322.098,46)
3.	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(1.772.262.176.767,97)
	Total	(1.807.308.285.641,85)

4.1.4.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 1.266.392.700,00**

1.1.4.3.5 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 22.550.846.285,00**

Mutasi/perubahan saldo Aset Tak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Aset Tak Berwujud	Rp	19.536.735.785,00
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	3.014.110.500,00
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Mutasi/pindahan dari SKPD lain	Rp	-
Hasil Penilaian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk (dari aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	3.014.110.500,00
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (ke aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	22.550.846.285,00

Dengan demikian penambahan Aset Tidak Berwujud sama persis dengan realisasi Belanja Modal dan tidak terdapat transaksi yang tidak dipengaruhi oleh realisasi belanja.



1.1.4.3.6 Amortisasi

Saldo Amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar **(Rp 15.203.975.585,00)** yang merupakan nilai dari koreksi amortisasi tahun-tahun sebelumnya dan beban amortisasi tahun 2019. Rinciannya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Tahun Mulai Penyusutan	Nilai	Penyusutan Per Tahun	Beban Amortisasi 2019
1	Pengembangan Aplikasi Data Base Perkantoran	14/07/2010	5	2011	46.870.000,00	9.374.000,00	-
2	Perencanaan Master Plan Pembangunan Jalan	07/11/2011	5	2012	250.104.800,00	50.020.960,00	-
3	Perencanaan Master Plan Drainase/Gorong-Gorong Kel. Mendawai, Kel. Raja dan Kel. Baru (Arut Selatan)	28/07/2011	5	2012	195.690.000,00	39.138.000,00	-
4	Masterplan Jaringan Irigasi DR Sulung + DR Kenambu	21/10/2011	5	2012	122.430.000,00	24.486.000,00	-
5	Masterplan Jaringan Irigasi DR Kotawaringin Hulu	19/12/2011	5	2012	296.477.500,00	59.295.500,00	-
6	Penyusunan DED Air Minum	29/11/2011	5	2012	261.888.000,00	52.377.600,00	-
7	Masterplan Pengendali Banjir Kota Kumai Kecamatan Kumai	21/11/2011	5	2012	196.680.000,00	39.336.000,00	-
8	Data Base Perumahan dan Permukiman Bidang Cipta Karya	30/06/2011	5	2011	138.361.300,00	27.672.260,00	-
9	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kota Kumai	29/07/2011	5	2012	146.190.000,00	29.238.000,00	-
10	Peta Topografi Dan Geologi Tanah TPA 30 Ha	01/10/2012	5	2013	283.698.469,00	56.739.693,80	-
11	Rencana Rinci Tata Ruang Kelurahan Baru, Raja Dan Mendawai,	01/10/2012	5	2013	240.890.001,00	48.178.000,20	-
12	Lanjutan Data Base Perumahan Dan Permukiman	27/06/2012	5	2012	178.281.733,00	35.656.346,60	-
13	DED Pengendali Banjir Kota Kumai, Kecamatan Arut Selatan	02/11/2012	5	2013	245.073.400,00	49.014.680,00	-
14	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kotawaringin Barat (masterplan).	27/08/2012	5	2013	492.069.600,00	98.413.920,00	-
15	DED Jaringan Reklamasi Rawa DR Kotawaringin Hulu + DR Kotawaringin Hilir + DR Desa Dawak, Kecamatan Kotawaringin Lama	02/11/2012	5	2013	294.206.000,00	58.841.200,00	-
16	DED Jaringan Reklamasi Rawa DR Sulung + DR Kenambui, Kecamatan Arut Selatan	18/10/2012	5	2013	244.487.100,00	48.897.420,00	-
17	Master Plan Drainase Kawasan Ibukota Kecamatan Kumai, (Kelurahan Kumai Hulu, Kelurahan Kumai Hilir, Kelurahan Candi, Desa Sei Kapitan, Desa Sei Tendang)	17/09/2012	5	2013	493.020.000,00	98.604.000,00	-
18	DED Drainase / Gorong- gorong Kelurahan Mendawai, Kelurahan Raja Dan Kelurahan Baru, Kecamatan Arsel	27/06/2012	5	2012	197.472.000,00	39.494.400,00	-



No.	Uraian	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Tahun Mulai Penyusutan	Nilai	Penyusutan Per Tahun	Beban Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi 2019
19	Master Plan Drainase / Gorong-gorong Kelurahan Sidorejo, Madurejo Dan Kelurahan Pasir Panjang, Kec. Arsel	27/06/2012	5	2012	195.855.000,00	39.171.000,00	-	195.855.000
20	Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Kelurahan Raja	25/10/2012	5	2013	97.867.030,00	19.573.406,00	-	97.867.030
21	DED Drainase / Gorong-gorong Kelurahan Madurejo, Kelurahan Sidorejo Dan Desa Pasir Panjang	02/07/2013	5	2014	193.083.000,00	38.616.600,00	-	193.083.000
22	DED Drainase / Gorong-gorong Ibukota Kecamatan (Kelurahan Candi, Desa Sengai Kapitan dan Desa Sungai Tendang)	25/07/2013	5	2014	341.605.000,00	68.321.000,00	-	341.605.000
23	Master Plan dan DED Drainase/Gorong-gorong Kawasan Ibukota Kecamatan Pangkalan Banteng.	23/09/2013	5	2014	490.094.000,00	98.018.800,00	-	490.094.000
24	Master Plan dan DED Drainase/Gorong-gorong Kawasan Ibukota Kecamatan Kotawaringin Lama.	23/09/2013	5	2014	490.160.000,00	98.032.000,00	-	490.160.000
25	Survei Kondisi Jalan	21/08/2013	5	2014	98.450.000,00	19.690.000,00	-	98.450.000
26	Survei LHR	11/06/2013	5	2013	47.595.152,00	9.519.030,40	-	47.595.152
27	Survei Kondisi Jembatan	19/11/2013	5	2014	29.535.000,00	5.907.000,00	-	29.535.000
28	Penyusunan Detail Data Kawasan Reklamasi Rawa DR Tanjung Terantang	23/08/2013	5	2014	98.395.000,00	19.679.000,00	-	98.395.000
29	Penyusunan Detail Data Kawasan Reklamasi Rawa DR Kumpai Batu Bawah	23/08/2013	5	2014	98.780.000,00	19.756.000,00	-	98.780.000
30	Penyusunan Detail Data Kawasan Reklamasi Rawa DR Mendawai	23/08/2013	5	2014	98.945.000,00	19.789.000,00	-	98.945.000
31	Penyusunan Detail Data Kawasan Irigasi DI Berambai Makmur	09/07/2013	5	2014	49.060.000,00	9.812.000,00	-	49.060.000
32	Penyusunan Detail Data Kawasan Irigasi DI Kumpai Batu Atas	23/08/2013	5	2014	98.670.000,00	19.734.000,00	-	98.670.000
33	Study Teknis Sanitasi dan Study Partisipasi Sektor Swasta Dalam Sanitasi	23/08/2013	5	2014	391.160.000,00	78.232.000,00	-	391.160.000
34	Penyusunan Detail Data Pengendali Banjir Kota Pangkalan Bun.	30/07/2013	5	2014	48.290.000,00	9.658.000,00	-	48.290.000
35	Study Pengukuran dan Perencanaan Sungai-sungai di Kota Pangkalan Bun.	21/10/2013	5	2014	489.252.500,00	97.850.500,00	-	489.252.500
36	Review Program Bidang Cipta Karya Kabupaten Kotawaringin Barat	25/06/2013	5	2013	247.610.000,00	49.522.000,00	-	247.610.000
37	Penyusunan nRencana Rinci Tata Ruang Kelurahan Mendawai Seberang dan Raja Seberang.	12/08/2013	5	2014	122.393.229,04	24.478.645,81	-	122.393.229

No.	Uraian	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Tahun Mulai Penyusutan	Nilai	Penyusutan Per Tahun	Beban Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi 2019
38	Penyusunan Zoning Regulation Kelurahan Mendawai dan Baru	12/08/2013	5	2014	96.887.531,98	19.377.506,40	-	96.887.532
39	Penyusunan Zoning Regulation Kelurahan Kumai Hilir	12/08/2013	5	2014	97.565.438,98	19.513.087,80	-	97.565.439
40	Perencanaan Teknis Pentaan Kawasan Bundaran Pancasila	09/08/2013	5	2014	196.009.000,00	39.201.800,00	-	196.009.000
41	Penyusunan Data Jaringan Reklamasi Rawa DR Sebuai	13/10/2014	5	2015	98.010.000,00	19.602.000,00	19.602.000	98.010.000
42	Penyusunan Data Jaringan Reklamasi Rawa DR Kumai Hilir	13/10/2014	5	2015	98.010.000,00	19.602.000,00	19.602.000	98.010.000
43	Penyusunan Data Jaringan Reklamasi Rawa DR Sungai Bakau	13/10/2014	5	2015	98.010.000,00	19.602.000,00	19.602.000	98.010.000
44	Penyusunan Data Jaringan Irigasi DI Palih Baru Kec.Kotawaringin Lama	13/10/2014	5	2015	98.010.000,00	19.602.000,00	19.602.000	98.010.000
45	Penyusunan Data Jaringan Irigasi DI Pangkalan Satu + Reklamasi Rawa DR Kubu	13/10/2014	5	2015	98.010.000,00	19.602.000,00	19.602.000	98.010.000
46	Identifikasi Kawasan Pemukiman Kumuh Kabupaten Kobar	29/09/2014	5	2015	147.845.000,00	29.569.000,00	29.569.000	147.845.000
47	Data Base Bidang Cipta Karya	13/10/2014	5	2015	247.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000	247.500.000
48	Penyusunan Zoning Regulation Kelurahan Kumai Hilir	25/08/2014	5	2015	95.634.000,00	19.126.800,00	19.126.800	95.634.000
49	Survai dan desain Pengmbangan ring road ruas Pangkalan Bun -Kolam, Arsel +Kolam	29/06/2015	5	2015	373.450.000,00	74.690.000,00	74.690.000	373.450.000
50	Survai dan desain Pengmbangan ring road ruas Pangkalan Bun -Kumai, Arsel +Kumai	29/06/2015	5	2015	373.450.000,00	74.690.000,00	74.690.000	373.450.000
51	SID Pengaman Pantai Desa Sabuai - Desa Tanjung Putri	25/11/2015	5	2016	357.830.000,00	71.566.000,00	71.566.000	286.264.000
52	Inventarisasi Jaringan Reklamasi Rawa DIR Marga Mulya + DIR Pangkalan Banteng + DIR Mulya Jadi + DIR Natai Kerbau Kec. Pangkalan Banteng	14/09/2015	5	2016	99.066.000,00	19.813.200,00	19.813.200	79.252.800
53	Inventarisasi Jaringan Reklamasi Rawa DIR Raja Seberang + DIR Mendawai Seberang + DIR Tanjung Putri Kec. Arut Selatan	14/09/2015	5	2016	99.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000	79.200.000
54	Perencanaan Pintu Gerbang Perbatasan Kab. Kobar - Seruyan	27/07/2015	5	2016	49.060.000,00	9.812.000,00	9.812.000	39.248.000
55	Studi Amdal Pangkalan Bun Park	27/11/2015	5	2016	345.290.000,00	69.058.000,00	69.058.000	276.232.000
56	Perencanaan Pembangunan Gedung Serba Guna Olah Raga Sport Center Pangkalan Bun	30/07/2015	5	2016	157.448.500,00	31.489.700,00	31.489.700	125.958.800
57	Perencanaan Penataan Kawasan Kel. Raja Seberang Dan Mendawai Seberang	15/07/2015	5	2016	124.946.800,00	24.989.360,00	24.989.360	99.957.440

No.	Uraian	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Tahun Mulai Penyusutan	Nilai	Penyusutan Per Tahun	Beban Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi 2019
58	Penyusunan Rencana Teknis Kawasan Bundaran Pangkalan Lima (Kec. Arut Selatan)	03/08/2015	5	2016	99.407.000,00	19.881.400,00	19.881.400	79.525.600
59	Penyusunan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Kota Pangkalan Bun	30/11/2015	5	2016	345.875.200,00	69.175.040,00	69.175.040	276.700.160
60	Pembuatan Sistem Aplikasi Monitoring Infrastruktur dan Proses Administrasi Keuangan	13/12/2016	5	2017	193.215.000,00	38.643.000,00	38.643.000	115.929.000
61	Pekerjaan Inventaris jaringan reklamasi rawa DIR Lalang + DIR Rungun + DIR Sumber Mukti + DIR Kotawaringin Hilir + DIR Kotawaringin Hulu Kec. Kotawaringin Lama	04/10/2016	5	2017	98.120.000,00	19.624.000,00	19.624.000	58.872.000
62	Pekerjaan DED Air Limbah	03/11/2016	5	2017	343.915.000,00	68.783.000,00	68.783.000	206.349.000
63	Pekerjaan SID Saluran Induk Pengendali Banjir kota Pangkalan banteng Kec. Pangkalan Banteng	31/10/2016	5	2017	370.205.000,00	74.041.000,00	74.041.000	222.123.000
64	Pekerjaan Identifikasi Kawasan Kumuh Kec. Kotawaringin Lama dan Kec. Aruta	27/07/2016	5	2017	166.530.000,00	33.306.000,00	33.306.000	99.918.000
65	Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Data Base Cipta Karya Kec. Arsel	15/08/2016	5	2017	146.830.000,00	29.366.000,00	29.366.000	88.098.000
66	Pekerjaan Identifikasi Kawasan Kumuh Kec. P. Lada dan P. Banteng	05/09/2016	5	2017	183.915.000,00	36.783.000,00	36.783.000	110.349.000
67	Pekerjaan Identifikasi Bidang Cipta Karya Kec. Arsel	13/09/2016	5	2017	298.800.000,00	59.760.000,00	59.760.000	179.280.000
68	Pekerjaan Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Ruang TPA Baru Trans LIK Desa Pasir Panjang	18/04/2016	5	2016	97.251.000,00	19.450.200,00	19.450.200	77.800.800
69	Microsoft Office	12/10/2017	5	2018	34.611.500,00	6.922.300,00	6.922.300	13.844.600
70	DED Rumah Jabatan Kantor Bupati Kotawaringin Barat	09/10/2017	5	2018	244.915.000,00	48.983.000,00	48.983.000	97.966.000
71	DED Kawasan Kumuh Kec. Arsel	09/10/2017	5	2018	236.445.000,00	47.289.000,00	47.289.000	94.578.000
72	DED Kawasan Kumuh Kec. Kumai	09/10/2017	5	2018	244.420.000,00	48.884.000,00	48.884.000	97.768.000
73	Perencanaan DED Danau Asam Kec. Kotawaringin lama	23/11/2017	5	2018	315.688.000,00	63.137.600,00	63.137.600	126.275.200
74	Perencanaan DED Air Bersih Kotawaringin Lama	28/11/2017	5	2018	294.866.000,00	58.973.200,00	58.973.200	117.946.400
75	DED Normalisasi Sungai di Kec. Kumai	08/12/2017	5	2018	592.757.000,00	118.551.400,00	118.551.400	237.102.800
76	DED Drainase Kawasan Kota Kumai Kec. Kumai	13/12/2017	5	2018	444.840.000,00	88.968.000,00	88.968.000	177.936.000
77	DED Sistem Jaringan Air Limbah di Kec. P. Banteng	13/12/2017	5	2018	320.870.000,00	64.174.000,00	64.174.000	128.348.000
78	DED Normalisasi Sungau di Kecamatan Pangkalan Lada dan Kotawaringin lama	13/12/2017	5	2018	446.490.000,00	89.298.000,00	89.298.000	178.596.000



No.	Uraian	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Tahun Mulai Penyusutan	Nilai	Penyusutan Per Tahun	Beban Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi 2019
79	Rencana Induk Sistem DED + Site Plan Pangkalan Bun Park	14/12/2017	5	2018	197.505.000,00	39.501.000,00	39.501.000	79.002.000
80	DED Penataan Kawasan Bersejarah Kec. Kumai	15/12/2017	5	2018	197.120.000,00	39.424.000,00	39.424.000	78.848.000
81	Rencana Induk Sistem Pembangunan Air Minum Review (RISPAM)	15/12/2017	5	2018	228.899.000,00	45.779.800,00	45.779.800	91.559.600
82	Perencanaan Kawasan Wisata Kuliner Kumai	15/12/2017	5	2018	49.900.000,00	9.980.000,00	9.980.000	19.960.000
83	DED Danau Masorayan Kec. Kotawaringin Lama	22/12/2017	5	2018	360.844.000,00	72.168.800,00	72.168.800	144.337.600
84	Review Desain SID Penataan Kawasan Sungai Arut Kota Pangkalan Bun Kec. Arut Selatan	23/12/2017	5	2018	398.000.000,00	79.600.000,00	79.600.000	159.200.000
85	DED Pembangunan Embung Lokasi di Kecamatan Pangkalan Lada	16/11/2018	5	2019	283.141.000,00	56.628.200,00	56.628.200	56.628.200
86	DED Pembangunan Embung di Kecamatan Pangkalan Banteng	19/11/2018	5	2019	268.545.000,00	53.709.000,00	53.709.000	53.709.000
87	Perencanaan DED Air Bersih Kelurahan Baru, Natai Raya, Natai Baru, Bumi Harjo, Purba Sari, Pangkalan Durin, Sumber Agung, Pangkalan Satu Dan Sungai Rangit	17/12/2018	5	2019	329.155.000,00	65.831.000,00	65.831.000	65.831.000
88	Pembuatan DED Gedung Serbaguna / Aula Pemerintah Daerah Di Pangkalan Bun Park	10/12/2018	5	2019	99.044.000,00	19.808.800,00	19.808.800	19.808.800
89	Pembuatan Sistem Aplikasi Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten	28/09/2018	5	2019	202.895.000,00	40.579.000,00	40.579.000	40.579.000
90	Master Plan Kawasan Bersejarah Pasir Panjang Kec. Arsel	12/11/2019	5	2020	99.247.500,00	19.849.500,00	-	-
91	DED Kawasan Bersejarah Pasir Panjang Kec. Arsel	27/05/2019	5	2019	99.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000	19.800.000
92	Data Base Air Minum dan Air Limbah Kotawaringin Barat	16/10/2019	5	2019	348.260.000,00	69.652.000,00	69.652.000	69.652.000
93	Inventarisasi Penyusunan Data Dase Drainase / Gorong-Gorong Kec. Arsel dan Kec. Kumai	21/05/2019	5	2019	297.550.000,00	59.510.000,00	59.510.000	59.510.000
94	Inventarisasi Penyusunan Data Dase Drainase / Gorong-Gorong Kec. Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada	20/05/2019	5	2019	297.550.000,00	59.510.000,00	59.510.000	59.510.000
95	Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten (eJakon)	11/06/2019	5	2019	98.890.000,00	19.778.000,00	19.778.000	19.778.000



No.	Uraian	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Tahun Mulai Penyusutan	Nilai	Penyusutan Per Tahun	Beban Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi 2019
96	DED Sungai Bamban Kecamatan Arut Selatan (Basic Design)	07/10/2019	5	2020	99.330.000,00	19.866.000,00	-	-
97	DED Sungai Buun Kecamatan Arut Selatan (Basic Design)	07/10/2019	5	2020	99.330.000,00	19.866.000,00	-	-
98	DED Sungai Tembaga Kecamatan Arut Selatan (Basic Design)	07/10/2019	5	2020	49.555.000,00	9.911.000,00	-	-
99	DED Sungai Kapitan Kecamatan Kumai (Basic Design)	07/10/2019	5	2020	98.483.000,00	19.696.600,00	-	-
100	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kec. Arut Selatan	03/05/2019	5	2019	387.530.000,00	77.506.000,00	77.506.000	77.506.000
101	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan di Kecamatan Pangkalan Lada	07/05/2019	5	2019	197.285.000,00	39.457.000,00	39.457.000	39.457.000
102	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan di Kecamatan Pangkalan Banteng	12/04/2019	5	2019	198.000.000,00	39.600.000,00	39.600.000	39.600.000
103	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan di Kecamatan Kotawaringin Lama	29/07/2019	5	2020	198.385.000,00	39.677.000,00	-	-
104	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan di Kecamatan Arut Selatan	07/05/2019	5	2019	346.000.000,00	69.200.000,00	69.200.000	69.200.000
105	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pangkalan Bun Park	30/09/2019	5	2020	99.715.000,00	19.943.000,00	-	-
	Total				22.550.846.285		2.673.129.800	15.203.975.585

4.1.4.4 Kewajiban

4.1.4.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

4.1.4.4.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 254.171.626,00

Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Utang tambahan penghasilan pegawai Ub. Desember 2019	254.171.626,00
	Jumlah	254.171.626,00

4.1.4.5 Ekuitas

4.1.4.5.1 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.183.963.512.480,76

4.1.4.5.2 RK-PPKD

RK-PPKD per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.219.940.805.548,75

4.2 Informasi Tambahan

4.2.1 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. 4000 - 102000169, an. Bendahara Pengeluaran SKPD pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

